

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN  
GLOBAL: STUDI KASUS PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI  
BANTEN**

**Mandalika Hani Dyah Kemala<sup>1</sup>, Muhamad Fajar<sup>2</sup>, Agung Fauzi<sup>3</sup>**  
[hanymandalika914@gmail.com](mailto:hanymandalika914@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhamadpajar343@gmail.com](mailto:muhamadpajar343@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya**

**Abstrak:** Perubahan Iklim sering terjadi di Indonesia karena kondisi geografis Indonesia tepat pada garis katulistiwa, hal ini merupakan ancaman terhadap perubahan iklim, seperti banjir, tanah longsor dan lainnya. Dalam penelitian ini, kami akan mengeksplorasi berbagai inisiatif kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Provinsi Banten untuk mengatasi perubahan iklim. Kami juga akan mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kami ingin pemerintah pusat maupun daerah ikut turut menyelesaikan permasalahan perubahan iklim ini, karena tanpa bantuan pemerintah kita tidak akan bisa mengatasi masalah yang akan datang di setiap tahun, dan kita melihat dampak yang sangat lumayan besar buat masyarakat, mulai dari pertanian sampai kesehatan manusia.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah, Perubahan Iklim, Kesehatan, Pertanian.

***Abstract:** Climate change often occurs in Indonesia because Indonesia's geographical conditions are right on the equator, this is a threat to climate change, such as floods, landslides and others. In this research, we will explore various policy initiatives that have been taken by the Banten Provincial government to address climate change. We will also identify the obstacles and challenges faced in implementing the policy. We want the central and regional governments to take part in solving this climate change problem, because without government assistance we will not be able to overcome the problems that will come every year, and we see quite large impacts on society, from agriculture to human health.*

***Keywords:** Government Policy, Climate Change, Health, Agriculture.*

## PENDAHULUAN

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa suhu rata-rata di bulan september 2023 adalah sebesar 27.0o C. Sedangkan suhu normal udara klimatologis untuk bulan September ini adalah 26.6o C dengan periode 1991-2020 di Indonesia atau kisaran normal 20.1o C – 28o C. Menurut pernyataan tersebut, anomali suhu udara rata-rata pada bulan September 2023 menunjukkan anomali lebih tinggi keempat sepanjang pengamatan sejak 1981 dengan nilai sebesar 0.4o C. Untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan tercatat menjadi tahun terpanas yaitu pada 2016 dengan nilai anomali 0.6o C sepanjang periode 1981 sampai dengan 2022. Pada tahun 2022 sendiri menjadi tahun terpanas ke-13 dengan nilai anomali sebesar 0.2o C, sementara itu untuk 2020 dan 2019 berada dalam peringkat kedua dan ketiga dengan nilai anomali 0.4o C dan 0.5o C.

Iklim merujuk pada kondisi cuaca rata-rata di suatu wilayah ataupun planet dalam jangka waktu yang Panjang. Biasanya selama beberapa puluh tahun. Hal ini melibatkan faktor-faktor seperti suhu, kelembaban, curah hujan, dan pola angin. Perubahan iklim sering kali terkait dengan aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan suhu global dan perubahan ekosistem. Upaya untuk menghadapi perubahan iklim melibatkan kebijakan dan Tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak yang mungkin timbul.

Adapun indikator daripada perubahan iklim ini ialah adanya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang biasa disebut dengan global warming. Hal tersebut dapat merugikan manusia terutama pada kesehatan masyarakat. Beberapa diantaranya yaitu demam, gangguan pernafasan, dan lain sebagainya. Selain berdampak pada masyarakat, perubahan iklim juga merugikan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Seperti contohnya kebakaran hutan yang terjadi oleh ulah manusia sendiri yang mengakibatkan hewan kehilangan tempat tinggalnya serta tumbuhan yang mati oleh api dan cuaca menjadi sangat panas dan polusi akibat asap yang dihasilkan mencapai pemukiman warga.

Adanya perubahan iklim juga akan berdampak pada lahan pertanian warga, sebagai tanaman akan sangat hancur, hingga kian akan sulit melaksanakan tanaman yang baik. Tingkat kesuburan juga bisa berkurang bisa juga tanah yang berkurang juga dapat membuat tak dapat lagi dijadikan lahan pertanian yang subur lagi, sementara untuk area pertanain yang lainnya tidak dapat mendaptkan menghasilkan sayur-sayuran maupun tumbuhan yang lainnya perubahan iklim akan membuat dampak bagi pertanian maupun hutan karna tak hanya itu jumlah sayur-sayuran akan mengalami penurunan dari hasil yang tadinya banyak karna ada perubahan iklim menjadi sedikit.

Masyarakat yang kian rentan pada umumnya berada di dataran rendah yang tingkat perekonomiannya terkait erat dengan Pertanian dengan mengasilakan sayur-sayuran dan buah-buahan meraka akan terhalang oleh perubahan iklim, masyarkat dengan ekonomi kebawah sangat rentan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim tersebut, yang dimana masyarakat sangat bergantung kepada lahan pertanian meraka karna itu satu-satunya yang mereka harapkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari mereka. Karna masyarakat di dataran rendah itu sangat berketergantungan dengan hasil bumi maka dengan ini adanya perubahan iklim sangat membuat masyarakat dengan rata-rata petani ini bisa menyebabkan dampak buruk bagi sektor pertanian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah perubahan iklim mulai dikenal oleh masyarakat setelah diselenggarakan oleh KTT bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 yang menghasilkan agenda 21. Pada pertemuan yang di hadiri oleh 103 Kepala Negara dan 179 perwakilan negara anggota PBB, salah satunya menghasilkan kesepakatan perlunya untuk mengurasi emisi rumah kaca yang menjadi penyebab adanya perubahan iklim. Proses perubahan iklim perlu mendapatkan perhatian yang serius karena dampaknya akan dirasakan oleh semua bidang terutama di bidang pertanian.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa gas emisi rumah kaca merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang memberikan kontribusi terhadap efek rumah kaca. Menurut protocol Kyoto,

terdapat enam gas rumah kaca yang perlu dilakukan pengurangan agar dapat menghadap terjadinya perubahan iklim. Keenam gas tersebut adalah, Karbon dioksida, Metana, Nitrous Dioksida, Hydrofluorocarbons, Perfluorocarbons, dan Sulfur Hexafluoride. Dari keenam gas tersebut, karbon dioksida merupakan gas efek rumah kaca terpenting yang memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan panas bumi. Karbon dioksida diprediksi mempunyai kontribusi terbesar 83 persen penyebab radiaktif dari gas rumah kaca pada tahun 1994. Methan mempunyai kontribusi sebesar 15 persen, dan gas lainnya dianggap kontribusinya tidak signifikan.

Sebernya atmosfer bumi telah mempunyai unsur gas efek rumah kaca seperti uap air atau H<sub>2</sub>O. akan tetapi gas H<sub>2</sub>O tidak diperhitungkan sebagai gas rumah kaca yang efektif dan tidak dipergunakan dalam prediksi perubahan iklim. Hal ini dikarenakan keberadaan H<sub>2</sub>O sangat singkat yaitu 9,2 hari. Sedangkan gas lainnya mempunyai masa hidup di atmosfer yang cukup lama. Karbon dioksida mempunyai masa hidup 100 tahun, metana 15 tahun dan nitrous 155 tahun. Mengingat gas-gas tersebut mempunyai masa hidupnya masing-masing maka apa bila terakumulasi dalam bentuk gas rumah kaca akan dirasakan pengaruhnya dalam waktu yang sangat lama.

Sektor pertanian pada global memiliki sumbangsih sekitar 14 persen dari total pada emisi tahun 2000. Sumbangan emisi tertinggi sektor petanian berasal dari penggunaan pupuk, peternakan, lahan sawit, limbah ternak, dan pembakaran sisa-sisa ternak (WRI, 2005). Menurut US-EPA (2006), emisi sektor pertanian Indonesia pada tahun 2005 mencapai 141 juta ton karbon ekuivalen (MtCO<sub>2</sub>e). Hasil perhitungan oleh US-EP tersebut ternyata terlalu tinggi bila dibandingkan hasil perhitungan UNDP. Berdasarkan perhitungan UNDP (2009), kontribusi emisi karbon sektor pertanian jauh lebih rendah, yaitu 51,20 MtCO<sub>2</sub>e atau hanya 12 persen dari total emisi Indonesia.

Resiko dari perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi masa depan peradaban manusia di Indonesia, termasuk Indonesia. Merujuk Data Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu udara rata-rata di Indonesia per bulan Oktober 2023 mencapai 27,7 oC merupakan yang tertinggi untuk bulan yang sama sejak tahun 1981. Secara umum Indonesia mengalami kenaikan suhu +0,7oC dibandingkan periode rata-rata kurun 1991-2020 yang sebesar 26.8oC.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami ancaman perubahan iklim terhadap apa yang terjadi sekrang-sekrang ini, perubahan iklim adalah salah satu tantangan global terbesar yang akan di hadapi oleh umat manusia terutama di Indonesia pada abad ke-21. Dampaknya telah terasa oleh semua kalangan makhluk hidup di Indonesia mencakup fenomena yang terjadi sekarang ini, fenomena yang terjadi sekrang adalah perubahan iklim yang sangat berdampak bagi semua kalangan, mulai dari petani ataupun nelayan karna perubahan iklim bukan hanya terjadi di daratan di laut pun akan mengalami perubahan iklim. Kalua di laut akan mengalami perubahan cuaca yang bisa menghambat

para nelayan untuk mengambil ikan di laut karna ketika perubahan angin laut yang sangat besar otomatis para nelayan tidak akan membawa perahu tersebut di lautan lepas karna akan menimbulkan resiko yang sangat besar.

Dan Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung dengan hasil laut, hal ini merupakan acaman terhadap perubahan iklim, seperti Angin pasang, Tanah longsor, dan Gagalnya panen. Yang bisa terjadi di Indonesia kapan saja, karena perubahan iklim yang bisa datang kapan saja. Dan dampak dari perubahan iklim bukan hanya pada sektor nelayan maupun pertanian tetapi pada sektor Insfatuktur di Indonesia. Dalam beberapa tahun, dan dampak perubahan iklim telah menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah maupun masyarakat, dan perubahan iklim dapat mengancam kehidupan manusia dengan dampak kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan yang bisa menyebabkan kerugian ekonimos bagi masyarakat sekitar yang terdampak.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya yang melimpah. Namun pada kenyataannya banyak kerusakan lingkungan yang cukup tinggi, dengan adanya perubahan iklim ini maka Indonesia akan mengalami kerusakan lingkungan setiap tahunnya. Kecenderungan perubahan iklim di Indonesia itu akibat ulah manusianya sendiri karna banyak sekali manusia yang suka melakukan hal-hal yang bisa memunculkan perubahan iklim contoh ketika manusia menebang pohon sembarangan akan menimbulkan bahaya seperti Tanah longsor, Banjir bandang, dan Letusan gunung Merapi berarti perubahan orbit bumi terhadap matahari, noda matahari dan El-Nino.

Setelah kita membahas mulai dari perubahan iklim yang ada di Global sampai di Indonesia kita balik lagi ke lokal, provinsi banten yang terletak di pesisir pulau jawa, adalah salah satu wilayah yang sangat rentan dari persoalan perubahan iklim. Terletak di sepanjang pantai laut jawa, provinsi banten menghadapi resiko yang serius, termasuk perubahan iklim, kenaikan air laut yang signifikan dan mengalami banjir, dan erosi pantai.

Dalam kontek ini, pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang paling tinggi di provinsi banten maupun di nasionalnya, pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mengatasi perubahan iklim tersebut dan pemerintan bisa memetigasi dampak dari perubahan iklim tersebut dan bisa membuat staregi adaptasi yang efektif. Oleh karena itu kami melakukan penelitian menganalisi terhadap kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Banten dan menghadapi tantangan global yang akan di hadapi Bersama-sama dan harus di fokuskan untuk provinsi banten, karna rata-rata masyarakat di Provinsi Banten itu sebagai petani dan nelayan, perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di pesisir pantai maupun di dataran rendah, karna mereka pekerjaan mereka adalah seorang petani maupun nelayan. Ketika ada perubahan iklim yang terjadi di dataran rendah maka akan menimbulkan suatu dampak negatif bagi masyarakat, masyarakat akan kehilangan sebagian penghasilan mereka dan nelayan pun sama akan merasakan dampak terhadap ekonomi mereka yang berada di pesisir laut.

Maka dengan ini pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa memberi solusi untuk masyarakat sekitar dataran rendah maupun di pesisir pantai.

## **KESIMPULAN**

Perubahan iklim akan selalu datang di setiap tahunnya, maka dengan ini pemerintah pusat maupun daerah harus mempunyai kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim tersebut, karena perubahan iklim bisa menyebabkan berbagai polemik di masyarakat, karna mayoritas masyarakat Indonesia punya lahan pertanian yang membiayai keluarga mereka, ketika perubahan iklim terjadi di Indonesia para petani bisa gagal panen.

Di provinsi banten bisa terbilang mayoritas masyarakatnya petani, apa lagi di daerah Pandeglang di berbagai desa di kabupaten Pandeglang banyak sekali lahan pertanian

mereka mencari nafkah untuk keluarganya dari hasil tani mereka sendiri maka dari itu ketika adanya perubahan iklim maka sektor-sektor pertanian akan terhambat masa panennya, di sini kebijakan pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim sangat di butuhkan bagi masyarakat sekitar yang mayoritas petani.

Untuk mengatasi perubahan iklim bukan hanya melibatkan pemerintah setempat tapi masyarakat yang terkena dampak dari perubahan iklim ini harus di ikut sertakan juga karena masyarakat lah yang mengalami permasalahan perubahan iklim ini, maka dengan ini pemerintah harus berkolaborasi dengan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang bisa mengatasi perubahan iklim ini.

Sudah seharusnya masyarakat dan pemerintah berkolaborasi untuk mengatasi perubahan iklim ketika Masyarakat diikuti sertakan dalam pembuatan kebijakan perubahan iklim, yang di nasional maupun di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Florissa, CB, Subiyanto, A., Marnani, CS, Widodo, P. dan Saragih, HJR, 2022. Persebaran Wilayah Rentan Terdampak Perubahan Iklim Global di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Kewarganegaraan* , 6 (4), hal.7115-7122.
- Efendi, M., Sunoko, H.R. and Sulistya, W., 2012. Kajian kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim berbasis daerah aliran sungai (Studi kasus sub DAS Garang Hulu). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 10(1), pp.8-18.
- OF, FSEOI, 2005. PERUBAHAN IKLIM, HAMA DAN PENYAKIT TERHADAP KEAMANAN PANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. Sesi ke-31 Komite Ketahanan Pangan Dunia. Roma .
- Murdiyarso, D., 2003. Sepuluh tahun perjalanan negosiasi konvensi perubahan iklim. Penerbit Buku Kompas.
- Keman, S., 2007. Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Unair* , 3 (2), hal.3934.
- Landon, M., 2006. Environment, health and sustainable development. McGraw-Hill Education (UK).
- Patz J.A dan Kovats R.S. 2006. Climate San Fransisco : Josery-Bass.
- McCarthy, J.J. ed., 2001. Climate change 2001: impacts, adaptation, and vulnerability: contribution of Working Group II to the third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Vol. 2). Cambridge University Press.
- Wafa, A. and Angin, R., 2024. Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), pp.338-351.
- Baskoro, P/ A. & Kurniawan, B. (2021), Implementasi Kebijakandan Lingkungan Hidup Kota Kupang, *Journal Of Bussiness Studies*, 4(2), 50-67.  
<https://banten.bps.go.id/site/chartResultTab>  
<https://brin.go.id/news/112114/data-kamajaya-tunjukkan-perubahan-iklim-2023-durasi-panjang-musim-hujan-di-indonesia>.
- Ainurrohmah, S. and Sudarti, S., 2022. Analisis perubahan iklim dan global warming yang terjadi sebagai fase kritis. *Jurnal Phi Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan*, 3(3), pp.1-10.
- Florissa, C.B., Subiyanto, A., Marnani, C.S., Widodo, P. and Saragih, H.J.R., 2022. Persebaran Wilayah Rentan Terdampak Perubahan Iklim Global di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), pp.7115-7122.
- Puspita, NY, 2020. Kapasitas Hukum Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Menangani Masalah Perubahan Iklim Global. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* , 8 (2), pp.66-82.